

Nuklir Iran dalam Neorealisme Defensif

Mohamad Fuat Najib

Mahasiswa Kajian Timur Tengah, UIN Sunan Kalijaga

fuadnajib345@gmail.com

Abstract

An anarchic international structure system, power is needed by every country to be able to survive. It is also said that the ultimate goal of the state is survival, not achieving power. This means that power is a means, not an end. This is also what Iran does in an international system that is ostensibly controlled by the United States. Iran, with its nuclear possession and development program, is considered a force that can threaten the forces that dominate the region and of course the United States. Iran's nuclear possession in the Middle East will affect other countries around it. In the view of defensive neorealism, Iran in the development of nuclear technology is a form of awareness of safeguarding its national security from the threat of hegemonic forces in the region and of course from the United States which threatens the sovereignty of the Iranian state. Because nuclear is considered as a power possessed by the state besides military and economic power.

Sistem struktur internasional yang anarki, power dibutuhkan oleh setiap negara agar mampu bertahan. Dikatakan juga, bahwa tujuan akhir negara adalah bertahan (*survival*), bukan mencapai power. Dengan maksud bahwa power merupakan sebuah cara, bukan sebuah tujuan. Hal ini juga yang dilakukan Iran dalam sistem internasional yang seolah-olah dikendalikan oleh Amerika Serikat. Iran dengan kepemilikan nuklir dan program pengembangannya dianggap sebagai kekuatan yang dapat mengancam kekuatan yang Hegemoni kawasan dan tentunya Amerika Serikat. Kepemilikan nuklir Iran di Timur Tengah akan mempengaruhi negara lain yang berada di sekitarnya. Dalam pandangan *neorealisme defensif*, Iran dalam pengembangan teknologi nuklir merupakan bentuk kesadaran menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman hegemoni kekuatan di kawasan dan tentunya dari Amerika Serikat yang mengancam kedaulatan negara Iran. Sebab nuklir dianggap sebagai power yang dimiliki oleh negara selain kekuatan militer dan ekonomi.

Keywords: Power, Nuclear Iran, National Security, Defensive Neorealism

Pendahuluan

Iran merupakan salah satu negara yang berada di Timur Tengah dengan kepemilikan sumber daya alam yang baik dan memiliki potensi dalam mengembangkan teknologi nuklir. Sejarah perkembangan nuklir Iran dimulai sejak adanya hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran pada tahun 1957 (Alcaf, 2008), di tahun ini ditandatangani perjanjian *Nuclear Cooperation Agreement* yang berisi pemberian bantuan fasilitas pengembangan nuklir kepada Iran untuk kepentingan damai dan penelitian. Amerika Serikat menganggap Iran adalah negara yang bersahabat dan tidak akan membahayakan negara. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara termasuk perjanjian nuklir ini. Oleh karena itu, setelah Shah Reza Pahlevi meminta pengembangan pusat penelitian di Universitas Tehran yang diberi nama *Tehran Research Center*, Amerika Serikat merespon dengan terus membantu dan menyuplai bahan-bahan yang diperlukan dalam pembentukan pusat penelitian tersebut. Salah satu hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membantu Iran adalah dengan mengirimkan bantuan untuk fasilitas nuklir berupa suplai 5 MW reaktor termal (*Thermal Research Reactor*) (Poleman, 1982).

Besarnya keinginan dalam pengembangan tenaga nuklir di Iran didukung oleh kondisi regional di Timur-Tengah yang sedang bergejolak dengan adanya perang Arab dengan Israel serta kenaikan harga minyak membuat Shah Reza Pahlevi berfikir untuk mempertimbangkan energi alternatif yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pembangunan Iran. Bila dilihat melalui data yang diambil dari penelitian oleh *Standford Research Institute*, Iran perlu mengembangkan energi alternatif berbasis non-minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya serta disarankan agar Iran membangun fasilitas nuklir yang mampu menyalurkan energi listrik sebesar 20,000 MW sebelum tahun 1994 (Zarif, 2007).

Pesatnya pengembangan teknologi nuklir di Iran sempat terhenti pada saat revolusi di Iran. Revolusi besar-besaran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dengan tujuan menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi yang dikenal sebagai Revolusi Iran 1979, mengubah bentuk negara menjadi Republik Islam Iran dengan pemerintahan yang menganut sistem demokrasi (International Atomic Energy Agency, 1993). Selain merubah tatanan politik dan sosial yang ada di Iran, revolusi ini juga merubah sikap kebijakan luar negeri yang dijalankan

oleh Iran pada masa lalu. Pada masa kepemimpinan Khoemeini, Iran kemudian mengambil sikap melakukan isolasi terhadap negara-negara Barat dan yang mengarah pada pemutusan hubungan bilateral antara Iran dengan negara-negara lain. Revolusi Iran tentunya juga memengaruhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan terjalin baik selama ini. Pada bidang pengembangan nuklir Khomeini mengambil sikap kebijakan untuk memberhentikan pengembangan nuklir karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islami dan cenderung dari barat.

Setelah berakhirnya pemerintahan Khomeini, dan kemudian digantikan oleh Pemerintahan Hasmani Rafsanjani pada tahun 1989-1997. Pengembangan Nuklir kembali dibangkitkan oleh pemeritahan Rafsanjani karena Iran benar-benar membutuhkan pasokan tenaga listrik bahkan pengelolaan minyak di Iran kian menurun akibat dari dampak pemutusan hubungan kerjasama Iran dengan negara-negara internasional khususnya negera Barat pada era pemerintahan Khomaiini. Pengembangan nuklir di era Rafsanjani kemudian kembali terlaksana di tahun 1991 yang ditandai dengan adanya hubungan bilateral antara Iran dan Rusia untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan reaktor nuklir dimana kerjasama ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hubungan kerjasama yang sempat terputus semenjak Jerman Barat membekukan reaktor nuklir di Busher.

Pengembangan nuklir dilanjutkan oleh pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad setelah mengalahkan Akbar Hashemi Rafsanjani dalam pemilihan umum Juni 2005 dan terpilih sebagai Presiden Iran. Selaku presiden, Ahmadinejad melakukan restrukturisasi terhadap tim negosiasi nuklir Iran. Negosiasi Iran-Uni Eropa pun mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disinyalir disebabkan dua hal, yaitu sikap Ahmadinejad yang sangat konservatif dan pihak Uni Eropa tidak mendapatkan dukungan dari AS. Dukungan AS dianggap penting oleh Uni Eropa karena akan berimbas kepada dukungan masyarakat internasional.

Pada Juni 2006, setelah kegagalan negosiasi tersebut, ketiga negara Uni Eropa yaitu Inggris, Prancis dan Jerman bergabung dengan anggota tetap DK PBB lainnya (USA, China dan Rusia) untuk mengajukan proposal baru ke Teheran. Sebulan setelahnya, terjadi perang antara Israel dan Lebanon yang mengakibatkan semakin tingginya tensi keamanan regional, termasuk juga hubungan Iran dan AS. Di tengah krisis perang Israel-Lebanon, negosiasi nuklir Iran semakin alot, karena AS meminta militer Iran untuk tidak turut campur dalam perang tersebut. Israel melancarkan serangannya ke daerah perbatasan

antara Lebanon dan Israel, di basis-basis kekuatan Hizbullah. Perang berakhir dengan kekalahan di pihak Israel dan secara efektif meruntuhkan reputasi Israel sebagai kekuatan militer terdepan di Timur Tengah. Hal ini berimbas pada sikap AS terhadap Iran karena negara tersebut dipandang sebagai pendukung utama Hizbullah. Isu Nuklir Iran menjadi isu yang terus memanas, bahkan tekanan dunia-dunia Barat juga terus mengalir terhadap Iran melalui Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) (Charbonneau, L. 2003). Memanasnya isu nuklir ini didukung oleh negara Amerika Serikat dan negara-negara Barat selalu gencar melakukan propaganda melalui berbagai media untuk memberitakan mengenai pengembangan nuklir yang dilakukan oleh pemerintahan Iran di era Ahmadinejad.

Naiknya Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran yang baru seakan memberikan titik terang bagi Iran mengenai konflik pengembangan nuklir yang dikecam oleh banyak negara internasional. Di bawah kepemimpinan Rouhani, negara Iran sangat memberikan solusi agar permasalahan nuklir Iran dapat diselesaikan secara damai. Tidak lama setelahnya pada tanggal 22 November 2013, Rouhani mencoba memutuskan untuk diadakannya perundingan antara negara Iran dengan Negara P5+1 yakni Amerika Serikat, Russia, Inggris, Perancis, Tiongkok dan ditambah Jerman yang diadakan di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati solusi konflik program atom dengan negara Iran. Sikap Presiden Iran Rouhani oleh sebagian pihak dianggap mampu mengurangi tensi konflik di Timur Tengah terutama mengenai kesepakatan nuklir Iran dan P5 +1 yang selama masa periode Ahmadinejad tidak mengalami kemajuan. Pada bulan September tahun 2013 Rouhani berkunjung ke New York untuk hadir dalam Sidang Umum PBB dan menghadiri pertemuan dengan negara P5 +1. Pertemuan tersebut berjalan tidak begitu lama karena semua pihak yang hadir langsung bersepakat untuk membahas perkembangan nuklir Iran. Setelah hampir 20 bulan melakukan negosiasi yang intens, pada Juli 2015 Iran dan P5 +1 akhirnya mencapai kesepakatan yang dirancang untuk membatasi kemampuan pengayaan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi dari AS, Uni Eropa dan PBB.

Secara kronologis Iran dan Amerika Serikat memiliki catatan sejarah hubungan yang diwarnai dengan hubungan baik pada awalnya kemudian menjadi ketegangan, khususnya pasca Revolusi Islam yang terjadi di Iran pada tahun 1979. Kedua negara pernah memiliki hubungan baik, Iran pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi menjalin hubungan baik dengan Amerika

Serikat, tetapi pemerintahan yang dibangun oleh Shah Reza tidak memberikan citra baik terhadap masyarakatnya yang melihat bahwa pemerintahan Shah Reza tidak memikirkan rakyat dan terlalu mengikuti perintah dari Amerika Serikat, hingga akhirnya Iran mengalami revolusi pada tahun 1979 yang berdampak pada sistem politik dan pemerintahan Iran yang mulai menjauh dari AS dan mulai mencoba untuk menjadi negara yang independen dan kuat di kawasan Timur Tengah. Pasca Iran mengalami revolusi, hubungan kedua negara berubah kearah yang lebih negatif. AS melihat revolusi yang terjadi di Iran menyebabkan berubahnya konfigurasi kekuatan di Timur Tengah karena Iran pasca revolusi tersebut diambil alih oleh elit politik yang menentang ketergantungan terhadap AS.

Jika dilihat dari kebijakan pengembangan reaktor nuklir pada periode pemerintahan Ahmadinejad adalah sebagai kepentingan nasional Iran, dimana Iran memiliki kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyatnya dengan cara mengembangkan nuklir sebagai sumber daya alternatif listrik dikarenakan Iran mengalami peningkatan pendudukan setiap tahunnya dan membutuhkan nuklir untuk menopang kebutuhan tenaga listrik masyarakat. Selain untuk kebutuhan listrik nuklir juga digunakan untuk membantu pertanian, dalam hal pengobatan dan masih banyak lagi. Selain untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat, pengembangan nuklir di Iran juga digunakan sebagai kepentingan keamanan yakni sebagai upaya pertahanan diri dalam melindungi kedaulatan, rakyat, ekonomi dan wilayah kedaulatan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan Iran.

Perkembangan nuklir di Iran memunculkan berbagai tanggapan dari dunia internasional terkait keterikutan Iran dalam perjanjian *Non Proliferation Treaty* (NPT). Namun sekalipun terikat dalam NPT, Iran merasa memiliki hak untuk mengembangkan nuklir damai dan tentu saja itu menimbulkan banyak tekanan dari dunia barat dan rivalnya Israel sekalipun tujuan pengembangan nuklir Iran hanya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Iran dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). PLTN sangat membantu Iran dalam mencukupi kebutuhan listriknya yang juga dapat mengurangi penggunaan minyak bumi. Iran tetap melakukan aktivitas pengayaan uranium untuk menacapai kepentingan nasionalnya, yakni kesejahteraan rakyatnya.

Teori Neorealisme Defensif

Dari rangkain kronologis atau upaya-upaya Iran dalam pengembangan nuklir ini sebagai usaha dalam mempertahankan eksistensi negara dalam kawasan juga dalam dominasi Amerika Serikat. Peneliti mencoba menggunakan teori neorealisme dalam menggambarkan Iran dalam menyeimbangkan kekuatan sebagai bentuk dari *survive*. Neorealisme atau yang juga dikenal sebagai realisme strukturalⁱ yang dicetuskan oleh Kenneth N. Waltz merupakan pembaharuan kritis dari teori induknya yaitu realisme klasik. Sama seperti realisme klasik, aktor utama neorealisme adalah negara dan perilakunya serta berusaha menjelaskan mengapa hubungan antar negara di dunia internasional cenderung konfliktual. Menurut neorealisme, perebutan kekuasaan dan hubungan konfliktual antar negara bukan berasal dari kepentingan domestik negara seperti yang diungkapkan oleh realis klasik. Perbedaan diantara kedua teori adalah neorealisme Waltz lebih berfokus kepada sistem internasional yang anarki sehingga mendorong negara untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya demi pemenuhan kepentingan, bukan didorong oleh kepentingan domestiknya.ⁱⁱ

Sistem dengan struktur anarki membuat semua negara di dunia memiliki tujuan politik yang sama, yaitu *survival*. Negara tidak bisa bergantung pada entitas lain melainkan negara harus mengandalkan kemampuan mandiriya atau *self help* dengan menjadikan sarana-sarana terutama (bukan satu-satunya) militer untuk melawan negara lain.ⁱⁱⁱ Kecenderungan suatu negara untuk mengejar keseimbangan kekuatan yang ditentukan oleh kekuatan militer menjadi ancaman bagi negara lain karena mereka tidak bisa memprediksi apa yang selanjutnya akan dilakukan negara tersebut. Ambiguitas ini menuntut negara lain untuk melakukan hal yang sama sehingga dikenal dengan *security dilemma*.^{iv} Selain itu, neorealisme dalam pandangannya juga melihat unit dalam sistem, yaitu negara, dan distribusi kapasitas masing-masing unit dalam sistem. Menurut neorealisme, semua unit dalam sistem memiliki fungsi yang sama yaitu untuk *survive*, yang membedakan antar unit adalah distribusi kapabilitasnya yang tidak seimbang dan dapat berubah-ubah.

Waltz (1979) mengatakan, bahwa dalam sistem internasional yang anarki, *power* dibutuhkan oleh negara agar mampu bertahan. Dikatakan juga, bahwa tujuan akhir negara adalah bertahan (*survival*), bukan mencapai *power*. Di sini bisa kita lihat bahwa *power* adalah cara, bukan tujuan. Hal ini juga yang dilakukan Iran dalam sistem internasional yang seolah-olah dikendalikan oleh AS. Iran bertahan dengan salah satu bentuk *power* yaitu kekuatan militer.

Kepemilikan nuklir Iran di Timur Tengah akan mempengaruhi negara lain yang berada di sekitarnya. Morgenthau dalam Levine (1986) menyatakan, bahwa nuklir akan memberikan implikasi yang luas bagi negara disekitarnya karena memberikan efek ancaman yang berbeda dengan persenjataan konvensional lainnya. Hal ini membantu Iran memberikan efek *deterrence* bagi negara pengancamnya dan memberikan banyak waktu untuk mempersiapkan kekuatan militernya sebagai kekuatan nasional (Morgenthau, 1985: 139). Secara politis, kepemilikan nuklir akan meningkatkan kekuatan politik Iran di Timur Tengah (The Economist, 2008: 29). Negara yang memiliki nuklir akan dianggap sebagai negara yang berada di tingkat atas (*top of the table*) dalam hubungan internasional (Baylis, 2002: 422). Kepemilikan nuklir membantu untuk mempertinggi posisi tawar Iran dalam hubungan internasional. Dari segi sosial, nuklir akan membantu Iran dalam menjaga identitas nasionalnya. Iran memiliki identitas sebagai negara muslim Shiah dimana agama ini adalah minoritas di Timur Tengah (Fawcett, 2005: 154). Masih menurut Fawcett (2005), Iran adalah negara dengan tingkat variasi etnis tertinggi di Timur Tengah. Dengan kebanggaan sebagai negara kuat dengan kepemilikan nuklir, akan mempermudah memperkuat keamanan nasionalnya karena kerusuhan etnis hanya terjadi di negara yang lemah (Buzan, 1991: 122). Buzan (1991) juga menyatakan, bahwa keamanan nasional secara sosial akan membantu menjaga keamanan nasional dalam jangka panjang.^v

Teori neorealisme yang digunakan dalam melihat aktivitas Iran adalah *neorealisme defensif* yang merupakan konsep besar dengan banyak varian argumen di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada argumen Robert Jervis (1978) mengenai dilema keamanan (*security dilemma*) dan argumen Waltz (1979) mengenai konsep keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Secara umum *realisme defensif* menyatakan bahwa sistem internasional memang memberi ruang kepada negara untuk melakukan perilaku agresif. Dalam asumsi *realisme defensif*, kondisi sistem yang anarkis memberi ruang bagi negara-negara superpower untuk meningkatkan kondisi keamanannya. Kondisi ini, secara tidak langsung, menurunkan kualitas keamanan di negara-negara lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa naiknya kualitas keamanan di negara A (yang ditandai dengan peningkatan kapasitas militer) akan berdampak terhadap menurunnya kualitas keamanan di negara lainnya (muncul kondisi terancam). Konsep tersebut yang oleh Jervis (1978) disebut sebagai kondisi dilema keamanan (*security dilemma*).

Dilema keamanan menyebabkan adanya kecurigaan antarnegara mengenai keselamatan dirinya di masa depan, niat/intensi dari setiap perilaku negara, dan kapabilitas kekuatan (militer) yang dimiliki oleh setiap negara. Di satu sisi, negara mungkin tidak bermaksud untuk mengancam negara lain, hanya melakukan langkah strategis untuk mencapai posisi-posisi internasional tertentu melalui peningkatan kualitas militer. Persoalannya, meneruskan argument Jervis, kondisi ini bisa dipandang sebagai ancaman oleh negara lain. Dalam pandangan *realisme defensif*, negara cenderung mengeluarkan kebijakan yang agresif karena pengambil kebijakan dalam negara cenderung mempunyai pemahaman bahwa bersikap agresif adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan keselamatan negara. *Realisme defensif* tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan tersebut. Solusi yang diajukan adalah dengan mengambil kebijakan yang cenderung moderat, tidak selalu agresif dan tidak selalu pasif, sebagai cara paling efektif untuk mejamin kondisi keamanan dan survivalitas negara. *Realisme defensif* menyatakan bahwa negara-negara superpower seharusnya lebih membatasi diri untuk tidak secara sporadis mengejar kekuatan melalui kebijakan militer, diplomasi, dan ekonomi. Pandangan tersebut merupakan kritik terhadap realisme klasik yang mengatakan bahwa perilaku negara harus selalu agresif untuk menjamin survivalitas negara.

Realisme defensif ini pada akhirnya menekankan bahwa negara tidak seharusnya melakukan maksimalisasi kekuatan, tapi hanya mencari kekuatan yang “tepat” (Waltz, 1979: 40). Apabila ada negara yang terlalu kuat, maka negara lain akan melakukan penyeimbangan (*balancing*) yang justru mendorong konflik semakin besar antarpihak. Oleh karenanya, sejalan dengan argument Van Evera mengenai keseimbangan serangan-pertahanan (*offence-defence balance*), maka pertahanan menjadi opsi yang lebih rasional, bahwa menyerang lebih menguras sumberdaya daripada bertahan, sehingga negara yang diasumsikan rasional akan membatasi diri agar tidak menciptakan konflik besar.

Teori neorealisme dapat digunakan dalam menggambarkan sikap Iran dalam pola hubungannya menghadapi ancaman nuklir Israel yang cenderung ambigu. Tidak adanya kekuasaan lebih tinggi dari negara dalam sistem internasional membuat baik Iran maupun Israel akan terus berlomba menyeimbangkan kekuatan diantara keduanya agar tercipta situasi *balance of power*. Neorealisme juga dapat digunakan untuk melihat apa yang mendasari

muncul kembalinya ambisi Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dengan uji coba misil yang kerap kali dilakukannya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dan selanjutnya dilanjutkan dengan analisis. Peneliti akan menjabarkan fenomena berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Metode kualitatif ini merujuk pada langkah pengumpulan dan dilanjutkan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai realitas sosial, sehingga kita fokus pada makna dan proses yang membentuk fenomena tersebut.^{vi}

Pembahasan

Dominasi Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah

Amerika Serikat telah menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis pasca berakhirnya Perang Dunia II. Arti strategis kawasan Timur Tengah terhadap AS adalah persepsi AS tentang peningkatan kerentanan militer strategis terhadap Uni Soviet, penggulingan rezim di Iran yang dianggap sebagai ancaman kekuatan di Teluk yang kaya minyak dan konfrontasi terusmenerus dengan kepemimpinan revolusioner di Teheran, invasi mendadak Afghanistan oleh delapan puluh ribu pasukan Soviet, dan meningkatnya ketergantungan jangka panjang pada pasokan energi vital dari Timur Tengah telah menciptakan permintaan, dan peluang besar, untuk perbaikan besar-besaran dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap kepentingan regionalnya (Jabber, 1980: 68).

Dominasi AS dalam level global maupun di kawasan Timur Tengah dalam bidang ekonomi maupun militer menjadi tantangan bagi Iran dalam mengembangkan ekonomi dan militernya. AS sendiri telah menjadi negara yang mendominasi perekonomian dunia sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang ternyata berbanding lurus dengan perkembangan militernya dimana AS mendominasi kekuatan militer diantara negara-negara lain dengan anggaran militer yang mengungguli negara lain. Terlebih ketika Iran mulai mengintegrasikan ke dalam perekonomian global sebagai eksportir minyak dunia dan mulai mengembangkan program nuklirnya untuk mendukung keperluan domestik. AS melihat Iran sebagai suatu ancaman karena hal serupa

pernah terjadi pada China, dimana pasca China bergabung menjadi anggota WTO dan menciptakan kondisi interdependensi dengan AS membuat hubungan kedua negara memburuk di kawasan Asia Pasifik (Hufbauer & Woollacoot, 2012: 35). Kemudian permasalahan ekonomi yang terjadi antara AS dan China ekspansi ekspor China yang membuat perekonomian AS melemah karena jumlah ekspor yang semakin banyak maka barang-barang China yang dijual di AS menjadi sangat murah dan mengalahkan produk dalam negeri AS. Kemudian AS merespon dengan mengeluarkan kebijakan proteksionisme yang ditujukan kepada China, yang membuat China membawa masalah ini ke WTO tetapi ditolak oleh panel WTO (Ikenso, 2012: 2).

Hegemoni pengaruh AS di kawasan Timur Tengah menurut beberapa peneliti diperkirakan mulai melemah. Perjanjian antara AS dan Rusia terkait penghapusan program senjata kimia Suriah merupakan contoh yang mengarah pada pembahasan pelemahan AS di kawasan Timur Tengah, keterlibatan Iran dan Hizbullah dalam *proxy war* di konflik Suriah (Abrams, 2013). Tetapi AS dalam segi kekuatan tidak mengalami penurunan sebaliknya mengalami sedikit kenaikan dimana hal ini disebabkan terutama oleh dominasi militer AS, posisi strategis kuat dari sekutu regionalnya dan stagnasi atau penurunan dari pesaing AS. Skenario AS untuk menurunkan kekuatan di Timur Tengah melihat dari potensi ancaman dari Iran bersama sekutunya Rusia dalam memainkan pengaruhnya di konflik Suriah. AS beserta sekutunya berusaha untuk mengembalikan status quo dengan terus memberikan tekanan dan meningkatkan kehadiran kekuatannya dalam membendung potensi konflik yang terjadi di Suriah agar tidak merembet ke negara-negara sekutu AS di kawasan Timur Tengah.

Masalah bagi Iran terlihat bahwa ancaman utama bagi negara Iran bukan berasal dari negara kawasan yang sama AS. Memerangi AS adalah sebuah keharusan karena sebelumnya Iran dianggap mengotori dirinya sendiri dengan melakukan westernisasi ketika pemerintahan Reza Pahlavi berkuasa. Isolasi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS kepada Iran sejak 27 tahun yang lalu tidak membuat Iran hancur (Vakil, 2006: 51). Dengan mengambil filosofi dari pemimpin spiritual Iran Ayatullah Khomeini, setan besar AS bertujuan untuk mengganti semua rezim Muslim, merusak Iran, dan mengganggu umat muslim diseluruh dunia (Menashri; 2003: 4). Kebencian Iran dimulai sejak revolusi Islam Iran, dan saat ini dengan adanya pasukan AS di Irak dan Afghanistan membuat

Iran yang secara militer relatif lemah mencari alternatif baru untuk membangun reaktor nuklirnya yang tertunda.

Masyarakat Iran tidak akan lupa kepada sanksi ekonomi yang diusahakan oleh AS dan akhirnya dijatuhkan oleh negara-negara lain yang turut mendukung AS. Iran menyatakan, bahwa tidak menjalin hubungan diplomatik dengan AS adalah kebijakan utamanya. Sudah sejak lama Iran tidak begitu peduli dengan keinginan AS di kawasan Timur Tengah yang dianggap ingin melakukan westernisasi. Karenanya ancaman kehadiran AS (lewat invasi Irak dan Afghanistan) yang berada tepat diperbatasan Iran adalah sesuatu yang perlu dicermati dan dikhawatirkan oleh Iran. Selain tekanan dan ancaman diberikan oleh AS, Iran memiliki ancaman lainnya dari wilayah yang sama yaitu dari Israel. Jika AS disebut sebagai Setan Besar, maka Israel diistilahkan sebagai musuh bebuyutan karena selalu didukung oleh AS dalam semua tindakannya. Hal ini menyiratkan bahwa ancaman dari Israel dan AS sejalan dalam menekan Iran untuk tidak memiliki perangkat pertahanan jika diserang, yaitu nuklir.

Selain masalah Irak dan Afghanistan, Presiden AS George W. Bush menyatakan, bahwa menjaga Israel agar tetap aman adalah perhatiannya. Selain itu, AS akan mendukung Israel, yang mana Israel adalah musuh Iran, di kawasan Timur Tengah (The Economist, 2008: 13). Pihak Israel sendiri mengancam, bahwa Israel akan menyerang Iran karena kekhawatiran nuklir yang dimiliki oleh Iran akan membuat jarak kekuatan antara kedua negara akan semakin dekat. Israel sendiri tidak merasa ragu-ragu untuk bertindak sendiri, seperti yang mereka lakukan kepada Irak pada saat perang teluk pertama. Bagi Iran, cara terbaik mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk dan bisa saja terjadi, misalkan diinvasi AS, maka memiliki nuklir adalah sebuah hal yang diperlukan. Iran dapat dikategorikan sebagai negara yang tertinggal dalam pengembangan persenjataan militernya. Aspek militer sendiri adalah bagian penting bagi keamanan dan kekuatan nasional. Dan hal ini adalah potensi yang bisa dimiliki dengan kepemilikan senjata nuklir.

Neorealisme Defensif Iran sebagai Penyeimbang Kekuatan

Penyeimbangan kekuatan atau *Balanca of Power* merujuk pada suatu kondisi adanya distribusi kekuatan diantara negara-negara dalam sebuah sistem baik dalam lingkup internasional maupun regional. *Balance of power* idelanya akan menjamin bahwa kekuatan (power) tersebut terdistribusi dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada negara yang dapat melakukan dominasi

terhadap negara lain (Odgaard, 2003: 25). Dalam *balance of power* terdapat dua pola yakni pola persaingan langsung yang merujuk pada keinginan suatu negara untuk mendahului kebijakannya dari kebijakan negara lain. Sedangkan pola kompetisi adalah keinginan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dalam rangka memaksimalkan kebijakannya. Mengenai *balance of power* antara Iran dan AS di kawasan Timur Tengah, pola yang terjadi adalah didominasi pola persaingan secara langsung. Hal ini terkait dengan keberadaan kebijakan-kebijakan Iran dan AS yang ditujukan terhadap satu sama lain.

Iran melihat bahwa dalam konteks hegemoni kekuatan, AS telah mendominasi kawasan Timur Tengah dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bagi Iran, hegemoni kekuatan AS di kawasan Timur Tengah menjadi suatu penghalangan dan membatasi Iran untuk meningkatkan dan mempertahankan trend positif perkenomiannya dan stabilitas kawasan, karena ketika kawasan tidak stabil dalam hal ini terdapat satu kekuatan unilaterial yang mendominasi maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam sistem. Dalam bidang ekonomi Iran merupakan negara pengekspor utama di Timur Tengah terhadap kawasan Eropa dan Asia, dimana Itali dan Spanyol bersama telah mengimpor 10 persen minyak untuk kebutuhan domestiknya dari Iran (The Guardian, 2012). Tetapi dalam kenyataannya, nilai minyak Iran tergantung pada seberapa besar minyak Iran berkontribusi dalam perdagangan global, hal ini yang menjadi kekhawatiran Iran ketika suatu saat AS melakukan tindakan yang dapat menghentikan produksi atau pasokan minyak Iran ke pasar dunia maka stabilitas nasional Iran akan terganggu. Kemudian dalam bidang stabilitas keamanan di kawasan, kehadiran kekuatan AS dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah dari Perang Teluk sampai dengan konflik di Suriah memunculkan kekhawatiran bahwa AS bisa saja membawa konflik yang terjadi masuk kedalam internal Iran, meskipun hal tersebut belum terjadi tetapi AS masih mempermasalahkan program pengembangan nuklir Iran, dibuktikan dengan penarikan diri AS dari perjanjian *Iran Nuclear Deal* pada tahun 2018.

Kekhawatiran Iran berkaca pada visualisasi jaringan pangkalan AS di Timur Tengah cukup luas. Bahkan jika tidak menghitung kehadiran AS di Afghanistan, Amerika Serikat memposisikan banyak pangkalan gugus depan, *Forward Operation Sites* (FOS) dan Lokasi Keamanan Kooperatif, *Cooperative Security Locations* (CSL) dan pasukan di sepanjang pesisir Teluk, serta di Mediterania timur dan di sepanjang Tanduk Afrika. Meskipun angka akurat sulit didapat karena kepekaan politik negara-negara penerima dan perubahan

reguler dalam spesifikasi pangkalan karena kebutuhan operasional yang berbeda-beda, situs militer AS di kawasan itu jumlahnya puluhan. Di antara instalasi militer utama AS yang terletak di kampanye CENTCOM adalah Camp Kuwait di wilayah Arifjanin dan Buehring bersama dengan Camp al-Saliyah di Qatar (Lostumbo, 2013: 24). Kemudian, Amerika Serikat juga telah lama bekerja sama secara militer dengan Arab Saudi-musuh bebuyutan Iran-untuk melatih militer Saudi. Amerika Serikat secara luas dianggap memiliki komitmen kuat terhadap keamanan Arab Saudi, tetapi tidak ada perjanjian pertahanan formal antara kedua negara. Pada tahun 1990-an, Amerika Serikat mengerahkan puluhan ribu tentara ke Arab Saudi, terutama untuk mempertahankan wilayah itu melawan Irak, tetapi mundur pada 2003 setelah jatuhnya Saddam Hussein. Beberapa ratus pasukan tetap di negara itu untuk mengelola program pelatihan. Washington juga telah melakukan berbagai upaya kerja sama kontraterorisme dengan rezim Saudi, termasuk langkahlangkah untuk bekerja sama untuk memerangi pendanaan terorisme (Blanchard, 2009). Kondisi tersebut mengharuskan Iran membangun kekuatannya agar mampu melakukan deterrence terhadap hegemoni kekuatan AS di Timur Tengah.

Respon terhadap kondisi tersebut membuat Iran mengeluarkan kebijakan untuk melawan hegemoni AS dan melindungi multilateralisme di kawasan Timur Tengah. Iran akan merespon hal ini dengan melakukan pengurangan komitmen perjanjian Iran *Nuclear Deal* jika semua tidak mentaati isi dari perjanjian. Iran juga mulai memperketat keamanannya dengan melakukan penembakan jatuh pesawat tanpa awak AS pada bulan Juni 2019 dan hampir menimbulkan serangan balasan dari AS. Tindakan Iran tersebut merupakan komitmen dan respon Iran dalam menentang hegemoni kekuatan AS, dikutip dari pernyataan Wakil Presiden Eshaq Jahangiri bahwa “kebijakan luar negeri Iran adalah untuk melindungi multilateralisme di kawasan Timur Tengah dan menentang hegemoni AS” (Reuters, 2019). Respon yang diberikan Iran terhadap AS sebenarnya disebabkan oleh sikap unilateralisme AS ketika menarik diri dari perjanjian Iran *Nuclear Deal* pada tahun 2015 dan kemudian AS menjatuhkan sanksi terhadap Iran.

Iran juga memperkuat basis kekuatannya di kawasan Timur Tengah dengan melakukan *proxy war* dengan mendukung kelompok Hizbullah di Lebanon dalam upaya melemahkan hegemoni AS. Kemudian Iran juga mendukung Rusia dalam kebijakan luar negerinya untuk mendukung dan membantu Assad untuk tetap memegang kekuasaan di Suriah. Kebijakan Iran

terhadap Rusia dan Suriah kemudian keterlibatan Iran dengan Hizbullah di Lebanon memiliki kesamaan yaitu untuk menentang hegemoni AS. Kebijakan luar negeri Iran akhirnya dapat berdampak dalam jangka panjang terhadap hegemoni AS di kawasan Timur Tengah karena konflik yang terjadi Suriah dapat mentidakstabilkan sekutu AS yaitu Yordania, dimana menurut Abrams (2013) menyebutkan bahwa “Kehadiran tiga perempat juta atau sejuta pengungsi Suriah, AS akan dikalahkan dan posisi AS di Timur Tengah mengalami kemunduran bersejarah. Setiap harapan solusi yang dinegosiasikan untuk krisis nuklir Iran akan hilang. Sistem aliansi yang AS bangun di Teluk akan dicabik-cabik karena kredibilitas AS sendiri akan hilang” (Abrams, 2013). Peningkatan kekuatan Iran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Iran, dimana sejak Iran mengalami revolusi islam pada tahun 1979 dan lepas dari cengkraman AS, pembaharuan dan peningkatan dalam perekonomian mulai membaik dengan Iran menjadi salah satu pengeksport minyak dari kawasan Timur Tengah ke pasar global.

Iran dalam upayanya mengimbangi hegemoni AS dipertegas dengan pernyataan Laksamana Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan, “Pendekatan negatif negara-negara lain bukanlah karena sifat kegiatan nuklir, rudal, dan regional yang mengancam Iran. Sebaliknya, hal ini adalah karena penentangan mereka terhadap kekuatan baru Iran dalam hal ini, hanya dengan cara menghimpun kekuatan di kawasan pada tingkat *hard power* dan *soft power* yang dapat membuat negara mencapai keamanan nasional dan berkelanjutan” (Barzegar, 2018). Dalam perspektif Iran, memang terdapat korelasi langsung antara peningkatan kekuatan Iran dengan tingkat keamanan di kawasan. Hal ini merupakan sesuatu yang signifikan bagi Iran, baik dilihat dari keunungan geopolitik dalam mengintegrasikan ekonomi regional dan mengendalikan ancaman tradisional seperti AS dan nontradisional seperti terorisme yang mengancam keamanan Iran.

Program pengembangan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir telah membuat kekuatan di regional dan dunia internasional untuk percaya bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) regional berubah mendukung Iran. Meskipun kesimpulan dari kesepakatan nuklir pada Juli 2015 memecahkan masalah ini, kehadiran regional Iran, bersama dengan program rudal canggihnya, telah mencegah peningkatan kerjasama regional dan pembicaraan antara Iran dan para aktor di kawasan seperti Arab Saudi. Iran menolak rencana ekspansionis apa pun di balik aktivitas misilnya, dengan fokus pada aspek

pencegahannya dan berargumen bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh rasa tidak aman Iran dari kondisi rivalitas di kawasan dan luar kawasan. Dikutip dari Presiden Hassan Rouhani yang menyatakan bahwa membangun stabilitas dan keamanan sangat penting untuk mendorong aliran investasi asing ke Iran, yang merupakan tujuan utama di balik administrasi teknokratnya dalam menyimpulkan kesepakatan nuklir untuk mencabut sanksi dan menyelesaikan perbedaan strategis antara Iran dan Barat, terutama dengan Amerika Serikat (Barzegar, 2018). Penarikan Trump dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan mengembalikan sanksi telah membawa kendala geopolitik baru, membuat Iran mencari tindakan kebijakan luar negeri baru, menyesuaikan statusnya dengan lingkungan geopolitik baru dan keseimbangan kekuatan regional. JCPOA berusaha menyeimbangkan dua dimensi kebijakan luar negeri Iran yaitu perlunya kerja sama regional untuk bergabung dengan komunitas internasional dan penyerapan investasi asing melalui membangun stabilitas di wilayah tersebut di satu sisi, dan mencegah ancaman keamanan nasional dari wilayah tersebut di yang lain. Sebagai pelengkap dari prinsip-prinsip JCPOA secara bertahap gagal atau melemah hari ini, aspek pencegahan kebijakan luar negeri Iran menjadi lebih berani dalam kalkulus strategis Iran.

Kemudian, kecenderungan Iran yang terus-menerus untuk meningkatkan kerja sama regional telah terganggu oleh upaya Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Israel, karena tujuan prospektif mereka adalah untuk melibatkan AS dalam urusan regional, melawan kehadiran regional Iran yang semakin berkembang. Dalam keadaan seperti itu, meskipun pemerintah Eropa, Rusia dan Cina, mendukung penolakan kebijakan Trump, semua indikator menunjukkan bahwa ketakutan sektor swasta mereka dari tindakan balasan AS memaksa mereka untuk mengurangi pertukaran ekonomi mereka dengan Iran. Kemungkinan kendala geopolitik yang muncul terhadap Iran, telah menyebabkan para pemimpin Iran untuk memikirkan strategi “melihat ke dalam” (*inward-looking*), yang didasarkan pada mengandalkan sumber daya yang tersedia sendiri untuk memperkuat sistem independen nasional di sektor ekonomi, politik dan keamanan. Mengandalkan “konektivitas regional” yang kuat, kebijakan ini memiliki dua aspek: Pertama, mengintegrasikan ekonomi Iran ke dalam ekonomi negara lain di kawasan dalam konteks bilateral atau trilateral untuk memperkuat produk nasional Iran, dengan demikian memproses pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan karakteristik geopolitik lokal. Kedua, mengambil keuntungan dari sentralitas geografisnya untuk meningkatkan peran dan pengaruh politik-keamanannya dalam krisis regional yang sedang berlangsung

dalam konteks meningkatkan multilateralisme regional. Kebijakan ini dapat membantu Iran untuk menambah nilai strategisnya dan menyamakan keseimbangan kekuatan regional sesuai keinginannya.

Strategi *inward-looking* Iran disebutkan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengumumkan bahwa dua prioritas super negara ini selanjutnya akan “berfokus pada masalah ekonomi” dan “memperkuat hubungan di sekitar kawasan” (Zarif, 2017). Kebijakan *inward-looking* juga akan berupaya untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang aktif dan interaktif melalui menghubungkan stabilitas Iran dengan stabilitas kawasan. Seperti yang telah disebutkan, pembentukan kebijakan semacam ini merupakan hasil dari upaya Iran untuk menyesuaikan strategi kebijakan luar negerinya dengan perubahan geopolitik regional. Kebijakan luar negeri Iran berusaha untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan diri antara dua variabel “kerjasama” (*cooperation*) dan “pencegahan” (*deterrence*) di kawasan Timur Tengah. Munculnya ISIS dan saat ini pembentukan koalisi regional melawan Iran, ditambah dengan penarikan Trump dari perjanjian nuklir, meningkatkan rasa tidak aman strategis Iran dan membuat para pemimpin Iran untuk lebih fokus pada aspek pencegahan dari kebijakan luar negeri negara itu. Konsep pencegahan ancaman ini bahkan telah menunjukkan dirinya di bidang keamanan ekonomi Iran.

Dari segi ekonomi, kepemilikan nuklir berguna untuk mengurangi beban konsumsi minyak impor. Meskipun Iran memiliki banyak cadangan minyak bumi tetapi tidak bisa mengolahnya sendiri. Dari produksi 4.1 milyar barel, Iran hanya mampu memproduksi menjadi bahan bakar jadi sebanyak 0.2 milyar barel dari tingkat konsumsi sebesar 1.5 milyar barel (Sahidi dalam Kartini, 2005: 16). Dari angka tadi, kebanyakan digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik (Sahidi dalam Kartini, 2005: 12). Bila memiliki nuklir, Iran akan mampu mengurangi kebergantungannya kepada bahan bakar minyak dan berdampak positif dalam jangka panjang. Dari segi lingkungan, bisa dilihat dari faktor sumber daya yang dimiliki oleh Iran terutama dalam aspek bahan bakar fosil atau minyak mentah. Iran merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar ke empat di Timur Tengah. Jumlah cadangan minyak sebesar 89.7 thousand million barrel (Fawcett, 2005: 80). Dengan memiliki nuklir, ancaman invasi dari negara lain seperti yang AS lakukan kepada Irak bisa ditangkal (Dunn: 2007, 19). Menurut Buzan (1991), keamanan nasional terdiri dari multi faktor baik yang berupa fisik seperti teritori maupun yang tidak berupa fisik seperti value.

Kepemilikan nuklir bagi Iran akan mampu melindungi keamanan nasional mereka dilihat dari lima jenis keamanan menurut Buzan (Keamanan militer, sosial, politis, ekonomi, dan lingkungan).

Jadi, upaya Iran dalam pengembangan teknologi nuklir sebagai bentuk kesadaran dari ancaman hegemoni kekuatan di kawasan dan tentunya dari Amerika Serikat. Sebab nuklir dianggap sebagai power yang dimiliki oleh negara selain kekuatan militer dan ekonomi. Dengan begitu Iran jika dilihat dari teori neorealisme menggunakan konsep *neorealisme defensif* dalam menghadapi hegemoni kekuatan dari negara-negara yang dianggap mengancam kedaulatan negara Iran.

Kesimpulan

Iran sebagai negara yang memiliki nuklir menjadi sebuah ancaman bagi negara kawasan juga bagi Amerika Serikat, karena AS memiliki kekuatan dalam hegemoni di kawasan Timur Tengah. Bagi Iran, hegemoni kekuatan AS di kawasan di kawasan Timur Tengah menjadi suatu penghalangan dan membatasi Iran untuk meingkatkan dan mempertahankan trend positif perkenomiannya dan stabilitas kawasan, karena ketika kawasan tidak stabil dalam hal ini terdapat satu kekuatan unilaterial yang mendominasi maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam sistem. alam bidang stabilitas keamanan di kawasan, kehadiran kekuatan AS dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah dari Perang Teluk sampai dengan konflik di Suriah memunculkan kekhawatiran bahwa AS bisa saja membawa konflik yang terjadi masuk kedalam internal Iran, meskipun hal tersebut belum terjadi tetapi AS masih mempermasalahkan program pengembangan nuklir Iran, dibuktikan dengan penarikan diri AS dari perjanjian *Iran Nuclear Deal* pada tahun 2018.

Program pengembangan nuklir Iran yang semula sebagai penelitian dan sebagai kebutuhan pengganti listrik dalam beberapa tahun terakhir berubah menjadi kekuatan di regional dan dunia internasional untuk percaya bahwa keseimbangan kekuatan (*balance of power*) regional berubah mendukung Iran. Iran melakukan peningkatan dalam pengembangan teknologi nuklir sebagai bentuk kesadaran dari ancaman hegemoni kekuatan di kawasan dan tentunya dari Amerika Serikat. Sebab, nuklir dianggap sebagai power yang dimiliki oleh negara selain kekuatan militer dan ekonomi. Dengan begitu Iran jika dilihat dari teori neorealisme menggunakan konsep *neorealisme defensif* dalam

menghadapi hegemoni kekuatan dari negara-negara yang dianggap mengancam kedaulatan negara Iran.

Endnote

¹ Kenneth N. Waltz. 2000. Structural Realism after the Cold War. *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer, 2000), hal. 5-41

² Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

³ Kenneth N. Waltz. 1979, Loc Cit

⁴ Kenneth N. Waltz. 1979, Loc Cit

⁵ Kenneth N. Waltz. 1979, *Ibid*

⁶ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, 64

Refrensi

Baylis, John, dan Steve Smith, 2002, *The globalization of world politics*; 2nd edition, New York: Oxford University Press.

Buzan, Barry, 1991, *People states and fear*; 2nd edition; *Pan agenda for international security studies in the post cold war era*, New York: Harvester Wheatsheaf

Fawcett, Louise, 2005, *International relations of the middle east*, United Kingdom: Oxford University Press.

Fawcett, Louise, 2005, *International relations of the middle east*, United Kingdom: Oxford University Press.

Hufbauer, G. C. & Woollacoot, J. C. (2012). Trade Dispute Between China and United States: Growing Pains so Far, Worse Ahead? Dalam Herrmann, C. & Terhechte, J.P (eds) *European Yearbook of International Economic Law (EYIEL)*, 2, 35.

Ikenso, 2012: 2 Ikenso, D. (2012). Trade Policy Priority One : Avertng a U.S-China "Trade War". *Free Trade Bulletin* (47), 2

Jabber, P. (1980). *U.S Interests and Regional Security in the Middle East*. MIT Press, 109(4), 68

Mearsheimer, John J., (2001), *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton

Morgenthau, Hans dan Thompson, 1985, *The politics among nations; The struggle for Power and Peace*; Sixth Edition, United States: Random House Inc.

Odgaard, L. (2003). *The Balance of Power in Asia-Pacific Security USChina Policies on Regional Order*. London: Routledge.

Waltz, Kenneth, 1979, *Theory of international politics*, United States: AddisonWesley Publishing Company.

-

Abrams, E. (2013, 7 Mei). Syria, Russia, and American Weakness. Council on Foreign Relations. Diakses [https://www.cfr.org/ blog/syria-russia-and-american-weakness](https://www.cfr.org/blog/syria-russia-and-american-weakness)

Lostumbo, M. et al. (2013). Overseas Basing of US Military Forces: An Assessment of Relative Costs and Strategic Benefits. RAND Corporation diakses [https://www.rand.org/pubs/ research_reports/RR201.html](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR201.html)

The Guardian. (2012, 6 Februari). "Iran Oil Exports: Where Do They Go". Diakses <http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/feb/06/iran-oil-exports-destination>

Zarif, J. M. (2017, 10 Agustus). "Iran's foreign policy priority in the new government". Diakses [https://www.mehrnews.com/ news/4053673/](https://www.mehrnews.com/news/4053673/)